

# Five Nos Approach sebagai Bentuk Soft Hegemony Tiongkok di Kawasan Afrika

Muhammad Iqbal Oktariyansah

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
Universitas Sriwijaya

e-mail: oktariyansahokari@gmail.com

## ABSTRACT

*The independence of African countries from Western nations was seen by China as a major opportunity to demonstrate its with the five nos approach. This study aims to examine how the Five No Approach can serve as a form of China's soft hegemony in the African region. Using the method of historical structures, this research emphasizes how institutions and material capacities work together to shape ideas within a hegemonic system, also known as the triangle of force. The Five Nos approach reflects a subtle form of domination—China's soft hegemony in Africa. First, ideologically, the Five Nos construct the narrative that China is an equal partner, not an imperialist power like the Western countries. This idea resonates in Africa's historical context of colonial trauma, making it widely accepted and largely unresisted. Second, in terms of material capacity, China possesses significant economic power, which it uses to finance infrastructure and economic cooperation in Africa through initiatives such as the Belt and Road Initiative. This fosters economic dependency of African nations on China. Third, cooperation institutions—both bilateral and multilateral, such as FOCAC—further solidify China's position as a dominant actor shaping the direction of partnerships. Thus, the Five Nos can be understood as a soft hegemonic approach employed by China toward countries in the African region.*

**Keywords:** Africa, Five Nos, Hegemony, China

Kemerdekaan negara-negara Afrika dari negara barat dipandang oleh Tiongkok sebagai suatu kesempatan besar untuk menunjukkan hegemoni melalui pendekatan *Five Nos Approach*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *Five No Approach* dapat menjadi bentuk *soft hegemony* Tiongkok di Kawasan Afrika. Dengan menggunakan *method of historical structures*, penelitian ini akan menekankan pada cara pandang bagaimana institusi dan kapasitas material bekerja sama membentuk suatu ide yang berlaku dalam sistem hegemonik atau dikenal dengan *triangle of force*. Pendekatan melalui *Five Nos* ini memperlihatkan bentuk dominasi terselubung berupa *soft hegemony* Tiongkok di kawasan Afrika. Pertama, secara ideologis, *Five Nos* membentuk narasi bahwa Tiongkok adalah mitra sejajar dan bukan kekuatan imperialis seperti negara-negara barat. Ide ini tumbuh dalam konteks sejarah Afrika yang mengalami trauma akan kolonialisme, sehingga diterima secara luas dan tanpa resistensi. Kedua, dari segi kapasitas material, Tiongkok memiliki kekuatan ekonomi yang besar, yang digunakan untuk membiayai infrastruktur dan kerja sama ekonomi di Afrika melalui proyek-proyek seperti *Belt and Road Initiatives*. Hal ini menciptakan ketergantungan ekonomi negara-negara Afrika terhadap Tiongkok. Ketiga, institusi-institusi kerja sama, baik bilateral maupun multilateral seperti FOCAC. Hal ini memperkuat posisi Tiongkok sebagai aktor dominan yang mengatur arah kerja sama. Sehingga *five nos* dapat dikatakan sebagai pendekatan bersifat *soft hegemony* oleh Tiongkok kepada negara-negara di kawasan Afrika.

**Kata Kunci:** Afrika, Five Nos, Hegemoni, Tiongkok

*Global & Policy Vol.13, No.01, Januari-Juni 2025*

## **Pendahuluan**

Sejak abad ke-21, persaingan kekuatan atau *power* era ini menjadi sangat ketat. Persaingan ini ditandai dengan kebangkitan negara-negara berkekuatan baru di dunia, salah satunya adalah Tiongkok. Seiring dengan waktu, Tiongkok mulai membuka diri pada dunia internasional. Keterbukaan Tiongkok bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan pada arah kebijakan Tiongkok yang berpusat pada ekonomi politik internasional yang bersifat ekspansif dan hegemonik (Harahap, 2020). Beberapa waktu belakangan, Tiongkok bertransformasi menjadi negara dengan tujuan untuk menguasai dunia. Misi ini menandakan kebangkitan Tiongkok dalam dunia internasional. Kebangkitan Tiongkok saat ini dipandang negara lain menandingi hegemoni atau *major power* di dunia, yaitu Amerika Serikat dan Rusia (Toruan, 2021).

Thomas Volgy dalam Ikenberry dan Nexon (2019) mendefinisikan hegemoni sebagai bentuk kemampuan negara yang dengan tingkatan kapabilitas dan kekuatan dalam merubah aturan dan norma yang berlaku ditatanan internasional berdasarkan kepentingan yang dimiliki. Negara hegemon hadir sebagai penyeimbang dalam sistem internasional agar setiap negara di dunia dapat bekerja sama, serta meminimalisir dominasi kepentingan nasional suatu negara. Hadirnya Tiongkok sebagai hegemoni baru dalam tatanan internasional menandakan munculnya negara dengan poros kekuatan baru yang mampu mengisi persaingan antara Amerika Serikat dan Rusia yang sedang bersaing panas menunjukkan dominasinya. Kekuatan tersebut menghasilkan suatu kemajuan diberbagai bidang kehidupan di Tiongkok. Kemajuan yang tercipta tersebut tercipta melalui strategi serta kebijakan yang dilakukan oleh Tiongkok salah satunya dengan negara-negara kawasan Afrika (Overholt, 1994).

Kemerdekaan negara-negara Afrika dari negara barat dipandang oleh Tiongkok sebagai suatu kesempatan besar untuk menunjukkan hegemoni dan rasa simpatik untuk memunculkan diri sebagai negara pendukung persatuan Afrika (Agbebi & Virtanen, 2017). Motif utama Tiongkok dalam kebijakan Tiongkok ke kawasan Afrika adalah kebutuhan serta kepentingan Tiongkok dalam ekspansi sumber daya pendukung pengembangan sektor industri Tiongkok saat ini. Dari sudut pandang Afrika, terdapat beberapa kepentingan yang kemudian menyebabkan negara-negara kawasan Afrika ingin bekerja sama dengan Tiongkok ditengah hegemoni mereka. Dari sisi ekonomi, Tiongkok telah menjadi sumber utama dalam hal investasi dan pembangunan di Afrika sehingga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Dari sisi politik dan keamanan, peningkatan bantuan keamanan di wilayah Afrika mendorong negara tersebut menerima dengan baik Tiongkok dalam kawasan Afrika.

Selama bertahun-tahun, para pengamat memiliki asumsi dan spekulasi bahwa niat Tiongkok dalam kebijakannya ke kawasan Afrika dinilai sebagai model kolonialisme baru untuk mencampurkan hegemoninya. Namun, Tiongkok melalui pengaruhnya yang kuat di kawasan Afrika mampu meredam asumsi-asumsi yang mengarah pada Tiongkok. Salah satunya bentuk komitmen Tiongkok di kawasan Afrika ditunjukkan melalui pendekatan *Five Nos*. Pendekatan ini digunakan untuk membangun citra Tiongkok sebagai “mitra sejajar” atau “teman yang saling membutuhkan”, berbeda dari model kerja negara lainnya. Pendekatan ini mencakup lima prinsip utama dalam hubungan antara Tiongkok dan Afrika, yaitu:

1. Tidak mencampuri pembangunan nasional masing-masing
2. Tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing
3. Tidak memaksakan kehendak satu sama lain

4. Tidak menambahkan syarat politik terhadap bantuan atau investasi
5. Tidak mencari keuntungan politik dari kerja sama yang dilakukan

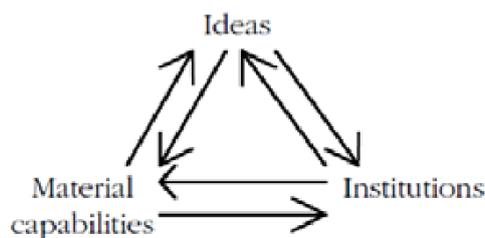
Presiden Xi Jinping dalam *Beijing Summit of the Forum on China – Africa Cooperation* yang dilaksanakan pada 3 September 2018 mengatakan bahwa pendekatan *five nos* yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap kawasan Afrika diharapkan dapat diterapkan dalam kerjasamanya dengan negara lain pula. Hal ini dikarenakan Tiongkok akan selalu menjadi teman dan mitra yang baik sehingga tidak akan ada yang dapat merusak hubungan baik antara Tiongkok dan Afrika (Batty, 2019). Penelitian ini akan melihat bagaimana pendekatan *five nos* dapat menjadi bentuk *soft hegemony* Tiongkok di kawasan Afrika melalui *method of historical structure*.

### Landasan Teori

Hegemoni sebagai representasi dari pengertian “dominasi” diinterpretasikan sebagai dua hal yaitu “dominasi suatu negara atas rekan-rekannya” atau “dominasi suatu negara atas negara lain” (Brem & Stiles, 2008). Premis yang membangun gagasan hegemoni adalah pentingnya sebuah ide tidaklah cukup hanya dengan kekuatan fisik saja dalam melakukan kendali dunia sosial politik. Ide hadir untuk membuat kondisi agar pihak yang terhegemoni tidak merasa terhegemoni dan juga pihak yang terhegemoni terpaksa memberikan persetujuan dalam setiap keputusan yang diberlakukan penguasa. Sehingga, Gramsci menyebutkan bahwa hegemoni termasuk dalam cara menguasai pihak lain melalui cara yang bersifat moral dan intelektual yang konsensus (Patria & Arief, 2015).

Namun, bagi Cox, perjuangan *common action* kekuatan sosial dapat menjadi sebuah alternatif atau “sebuah struktur rival” dari struktur yang berkuasa. Kebijakan Cox untuk melihat struktur rival ini disebut dengan istilah *Method Historical Structure* (MHS) atau *Framework of Action* (Sinclair, 2016). Melalui unit analisis “hubungan antara negara-masyarakat” atau apa yang Cox sebut dengan *state-society complex*, kebijakan *Method of Historical Structure* (MHS) akan mengidentifikasi kontradiksi dan konflik didalam sebuah struktur sejarah yang menciptakan sebuah perubahan dalam kerangka aksi bersama. Terdapat tiga kategori kekuatan yang saling berinteraksi pada sebuah struktur yaitu kapabilitas material (*material capability*), ide (*ideas*), dan institusi (*institutions*). Tiga faktor ini saling berhubungan dengan secara reiprokal yang disebut sebagai segitiga kekuatan (*triangle of force*) yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. *Triangle of Force Framework*



Sumber : Sinclair, 2016

Ide (*Ideas*) terbagi menjadi dua; gagasan intersubjektifitas berupa pemahaman atau cita-cita bersama (*intersubjectivity shared notions*) dan gambaran tentang tatanan sosial atau norma yang telah ada berlaku di suatu tatanan masyarakat (*images of social orders*). Kapasitas material (*Material Capabilities*) adalah penggunaan sumber daya sebagai solusi untuk mendukung ide yang ada, dan Institusi (*Institutions*) adalah sarana atau lembaga jangkar kekuasaan. Hubungan resiprokal segitiga kekuatan dalam *Method of Historical Structure* tersebut dapat menyimpulkan bagaimana *soft hegemony* yang dimaksud dalam hubungan keduanya (Sinclair, 2016).

### Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif. Menurut Saryono dalam Rukin (2021) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui kebijakan kualitatif. Jadi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu uraian dari fenomena yang terjadi, dan menekankan pada pentingnya pemahaman tentang makna perilaku manusia dan konteks sosial, politik, budaya, dan ekonomi dimana interaksi berlangsung.

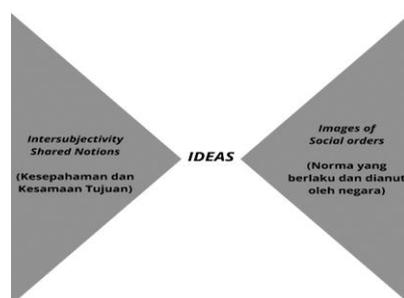
### Hasil dan Pembahasan

Pendekatan *Five Nos* digunakan Tiongkok untuk menaruh pengaruh dalam bentuk *soft hegemony* nya di kawasan Afrika. Terdapat tiga hubungan yang membuat bagaimana *Five Nos* dapat menjadi bentuk *soft hegemony* Tiongkok di kawasan Afrika berdasarkan *Method of Historical Structures*.

#### 1. *Ideas*

Ide mengacu pada gagasan yang memandu kebijakan dan tindakan negara dalam hubungan internasional. Kemudian ide dapat membantu cara pandang dan perilaku negara terhadap isu-isu internasional, mempengaruhi hubungan antarnegara, dan membentuk kebijakan luar negeri. Ide (*Ideas*) muncul karena adanya gagasan yang bersifat intersubjektifitas (*intersubjectivity shared notions*) yaitu adanya kesamaan tujuan atau kesepakatan bersama dan gambaran tentang tatanan sosial (*images of social orders*) yaitu adanya suatu norma yang telah berlaku dan dianut oleh negara. (Leysens, 2008).

Gambar 2. Proses Pembentukan *Ideas*



Sumber : Hasil Kontruksi Pemikiran Penulis

### **1.1 Intersubjectivity Shared Notions: Chinese-African Common Dream**

*Intersubjectivity Shared Notions* dimaknai sebagai persamaan tujuan yang timbul karena adanya kesepakatan bersama antar aktor. Pemahaman intersubjektif antara Tiongkok dan Afrika digambarkan dengan adanya kesamaan tujuan yaitu melalui *Chinese-African Common Dream* dengan komitmen untuk menghubungkan pembangunan antara Tiongkok dan Afrika, menyelaraskan kepentingan rakyat Tiongkok dengan kepentingan rakyat Afrika.

Xi dalam pidatonya percaya bahwa pembangunan hanya akan terwujud jika semua negara berkembang bersama. Kemakmuran dan stabilitas tidak mungkin terjadi di dunia di mana yang kaya menjadi lebih kaya sementara yang miskin menjadi lebih miskin. Hubungan antara *China Dream* dan *Africa Dream* merupakan symbiosis mutualisme, Tiongkok melihat Afrika sebagai mitra strategis untuk mencapai visi hegemoninya, sedangkan Afrika memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh Tiongkok untuk mengejar tujuan pembangunan mereka. Konsep "*China Dream*" terbagi menjadi empat tujuan, yakni: 1) *Strong China* (kuat secara ekonomi, politik, diplomasi, ilmu dan militer), 2) *Civilized China* (persamaan dan keadilan, budaya yang kaya, dan moral yang tinggi), 3) *Harmonious China* (persahabatan diantara kelas sosial), dan 4) *Beautiful China* (lingkungan yang sehat dan tingkat polusi yang rendah). Komitmen ini dijabarkan dalam visi "*China Dream*" oleh Presiden Xi Jinping. Menurut Xi Jinping, konsep "*China Dream*" memiliki kesamaan dengan "*African Dream*" yang bertujuan untuk menjadikan Afrika sebagai Kawasan yang mandiri dan berkembang (FOCAC, 2013). Penggunaan *African Dream* dalam kerangka *China Dream* bertransformasi menjadi salah satu kebijakan yang dilakukan Tiongkok dalam mendapatkan dukungan dari Afrika dalam mewujudkan agenda politik domestik maupun internasional Tiongkok.

Dalam mencapai "*China-Africa Common Dream*", Tiongkok berusaha untuk mewujudkan "*Chinese Dream of the Great Rejuvenation of China*". Dilain sisi, Afrika tengah berupaya dalam memenuhi aspirasi dalam mencapai *African Dream* seperti agenda *African Union 2063*, *blueprint* dan *master plan* untuk mengubah Afrika menjadi kekuatan global di masa depan. Tiongkok memiliki keunggulan dalam teknologi dan peralatan canggih, sementara Afrika memiliki sumber daya dan tenaga kerja yang kaya. Sehingga Tiongkok dan Afrika sama-sama melengkapi dalam mencapai tujuan bersama dan mewujudkan impiannya (Boc, 2015).

Di sisi lain, Tiongkok adalah pendukung lama peran utama *African Union* dan organisasi sub regional Afrika dalam menyelesaikan konflik regional, dan mendukung rakyat Afrika dalam menyelesaikan masalah Afrika dengan "*African Ways*". Tiongkok selalu mendukung Afrika dalam memainkan peran yang lebih besar di panggung dunia, berbicara untuk Afrika di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pada kesempatan multilateral lainnya, dan merupakan negara pertama yang secara eksplisit mendukung *African Union* untuk bergabung dengan G20. Namun, adanya "*Chinese-African Common Dream*" ini memunculkan kekhawatiran jika Tiongkok akan meningkatkan pengaruhnya di Afrika sehingga akan mempengaruhi kondisi internal Afrika.

## **1.2 Images of Social Orders: Non-Intervention and Responsible to Protect**

Gagasan *images of social orders* dimaknai sebagai tatanan sosial berupa norma yang telah berlaku dan dianut oleh suatu negara. Artinya, segala hal atau kerja sama yang dilakukan harus berpedoman pada norma yang berlaku di suatu negara. Norma digunakan sebagai aturan bagaimana aktor bertindak untuk mencapai kesamaan tujuan. Tiongkok dan Afrika sama-sama memiliki norma yang berlaku dalam hubungan kerja sama mereka dengan negara lain.

Sejak awal pandemi tahun 2020, Tiongkok juga terus berupaya memperkuat posisinya dalam sistem lembaga internasional, khususnya di dalam badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuan dari langkah-langkah ini adalah untuk membentuk norma, standar, praktik, dan aturan yang akan mendorong strategi jangka panjang Tiongkok (Paszak, 2020). Sifat multilateral dari lembaga-lembaga ini mendorong pemerintahan Tiongkok untuk terus mencari dukungan dari negara-negara berkembang, terutama negara-negara yang menjalin kerja sama ekonomi dengan mereka. Namun, banyak negara salah mengartikan kerja sama yang dilakukan oleh Tiongkok. Tiongkok dan Afrika memiliki kesepakatan bersama untuk berkomitmen tidak akan campur tangan dalam urusan internal masing-masing negara. Ini memungkinkan keduanya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama tanpa perlu khawatir akan campur tangan negara lain. Gagasan-gagasan politik secara eksplisit tidak menyebutkan bahwa suatu negara akan dengan mudah ikut campur dalam urusan internal atau dalam negeri negara lain. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingannya dalam suatu negara atau kawasan.

Komitmen untuk tidak campur tangan dalam urusan internal negara lain menjadi salah satu cara Tiongkok untuk meyakinkan negara-negara Afrika. Karena, mengingat masa lalu Afrika yang dihantui dengan trauma kolonisasi dan permainan politik negara-negara barat. Sehingga, Tiongkok berkomitmen untuk membuktikan perbedaan antara hubungan kontemporer Afrika dengan negara-negara barat dimasa lalu. Strategi ini kemudian terbukti berhasil dalam memenangkan dan mengamankan akses pasar serta sumber daya Afrika. Selama bertahun-tahun, Tiongkok telah membentuk kebijakan khusus untuk kerja sama win-win dengan Afrika (Traoré, 2021).

"Karakteristik Tiongkok" menggambarkan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan negara lain dalam kebijakan bantuan Tiongkok. Tiongkok membantu mengurangi kekurangan yang terjadi di Afrika sekaligus meningkatkan reputasi mereka di Kawasan Afrika. Di sisi lain, ini bertujuan untuk meningkatkan status globalnya dan meningkatkan kekuatan lunaknya sebagai kekuatan hegemonik baru dalam sistem internasional. Secara politis, karena Tiongkok ingin mengambil peran internasional yang lebih besar melalui konsolidasi dukungan negara-negara Afrika terhadap agenda internasional Tiongkok sehingga berhasil menempatkan diplomasi multilateral diatas agenda diplomatiknya.

## **2. Material Capabilities**

Kapasitas material merupakan segala bentuk sumber daya fisik yang dimiliki oleh suatu negara yang dapat memengaruhi keberlanjutan suatu ide atau norma ditanamkan kepada suatu wilayah atau negara. Sehingga pihak yang terhegemoni merasa patuh dengan adanya ide atau norma tersebut. Kemampuan material (*material capabilities*) adalah potensi produktif dan destruktif. Dalam bentuk dinamisnya hadir sebagai kapasitas organisasi dan teknologi, sedangkan dalam bentuk statisnya sebagai sumber

daya alam yang dapat diubah oleh teknologi, persediaan peralatan (misalnya industri dan persenjataan), serta kekayaan yang dapat mengendalikannya (Cox, 2004).

### **2.1 Eight Major Initiative**

Hal yang dilakukan oleh Tiongkok adalah dengan melalui *The Eight Initiatives*. Hal ini dinilai menjadi aspek andalan Tiongkok untuk menaruh pengaruh dan hegemoninya dengan dalih “kerja sama yang saling menguntungkan” atau “*win-win cooperation*”. Delapan inisiatif ini mencakup bidang-bidang seperti promosi industri, konektivitas infrastruktur, fasilitasi perdagangan, pembangunan hijau, pengembangan kapasitas, perawatan kesehatan, pertukaran orang-ke-orang, dan masalah perdamaian dan keamanan.

### **3. Institutions**

Institusi (*institutions*) adalah sarana atau lembaga untuk menstabilkan dan melestarikan tatanan kekuasaan tertentu. Institusi mencerminkan relasi kekuasaan yang berlaku di titik asalnya dan cenderung menjadi kendaraan hegemoni penguasa. Institusi dapat menjadi medan pertempuran dari kecenderungan yang berlawanan, atau merangsang pembentukan institusi alternatif yang mencerminkan kecenderungan yang berbeda. Institusi adalah gabungan Ide (Ideas) dan Kekuatan Material (Material Capabilities) yang pada gilirannya mempengaruhi perkembangan ide dan kemampuan material (Cox, 2004).

Selain itu, institusi menjadi jangkar untuk strategi hegemonik dengan cara meminjamkan diri mereka sebagai representasi dari berbagai kepentingan dan untuk universalisasi kebijakan. Hal ini dapat berupa kerja sama yang saling menguntungkan dengan tujuan membuat citra kolektif sehingga dapat menopang keberlanjutan dari ide atau norma yang sedang dilaksanakan. Institusi dapat membantu dalam menyebarkan, mempertahankan, dan mewujudkan ide tersebut. *Forum on China-Africa Cooperation* menjadi suatu institusi atau lembaga kerjasama yang mewadahi kebutuhan Tiongkok dan Afrika, yang seiring dengan waktu lembaga ini menjadi jangkar hegemonik dengan meminjamkan diri sebagai representasi dari berbagai kepentingan antara Tiongkok dan Afrika.

#### **3.1 Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC)**

Memasuki abad ke 21, Tiongkok dan Afrika menyatakan keinginan bersama mereka untuk lebih memperkuat kerjasama mereka dengan menciptakan forum kerjasama antara Tiongkok dan Afrika yang dinamakan *Forum On China-Africa Cooperation* (FOCAC). Forum ini resmi didirikan pada tahun 2000 di Beijing pada bulan Oktober. Forum kerjasama ini baru diluncurkan untuk pertama kalinya di Beijing yang diikuti oleh 80 kementerian dan 53 negara dari kawasan Afrika pada tanggal 10 hingga 12 Oktober 2000. Forum ini didirikan atas inisiatif bersama dari Tiongkok dan Afrika dengan tujuan untuk lebih memperkuat hubungan kerjasama diantara Tiongkok dan Afrika. Forum ini berfokus pada peningkatan kegiatan investasi dan juga perdagangan antara Tiongkok dan Afrika, dimana kegiatan perdagangan bebas terbuka bagi Tiongkok dan negara-negara Afrika. Hingga saat ini FOCAC telah dilaksanakan sebanyak 6 kali dalam jangka pelaksanaan setiap 3 tahun sekali (FOCAC, 2019).

Pertemuan ini dihadiri oleh 80 menteri yang bertanggung jawab atas urusan luar negeri dan perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi dari 45 negara-negara Afrika. Delegasi juga datang dari 17 organisasi internasional dan regional, dan perwakilan dari Malawi dan Liberia (dua negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Tiongkok pada saat pertemuan) (FOCAC, 2019). Pertemuan tersebut mencapai konsensus luas tentang pembentukan adil tatanan politik internasional dan ekonomi untuk abad ke-21, dan bagaimana mempromosikan ekonomi Tiongkok-Afrika dan kerjasama perdagangan. Pertemuan juga disiapkan dan melewati dua dokumen resmi Deklarasi Beijing *Forum On China-Africa Cooperation*, dan Pedoman Kerjasama Sino-Afrika Pembangunan Sosial dan Ekonomi untuk menyediakan kerangka kerja untuk Tiongkok dan Afrika untuk membangun lebih dekat dan lama, dan hubungan stabil yang saling menguntungkan. FOCAC mencerminkan bentuk dan isi dari hubungan sementara masa depan Tiongkok-Afrika bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesejahteraan antara Tiongkok dan Afrika (Johnson, 2015).

Forum kerjasama ini mempromosikan baik dialog politik maupun kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan maksud untuk saling mencari penguatan dan pembangunan umum. FOCAC merupakan pintu utama bagi hubungan diplomatik untuk formalisasi hubungan Sino-Afrika untuk mengatur hubungan kedepannya (FOCAC, 2018). Forum kerjasama Tiongkok-Afrika (FOCAC) dimulai tahun 2000. FOCAC yang pertama diselenggarakan di Beijing pada bulan Oktober 2000, yang kedua di Addis Ababa pada bulan Desember 2003, yang ketiga di Beijing pada bulan November 2006, yang keempat di Sharm El Sheik-Mesir pada bulan November 2009, yang kelima pada bulan Juli 2012 di Beijing, dan yang keenam pada Desember 2015 di Afrika Selatan, dan yang terakhir diselenggarakan FOCAC Summit pada bulan September 2018 di Beijing (FOCAC, 2018).

FOCAC bertujuan untuk lebih memajukan hubungan antara Tiongkok dan negara-negara Afrika yang memiliki hubungan diplomatik. Hal tersebut penting untuk melihat retorika dan meneliti seberapa sukses pelaksanaan janji FOCAC sudah di implementasikan di negara-negara Afrika. Anggota FOCAC itu sendiri ada 53 negara dan Komisi Perserikatan Afrika. Diantaranya adalah Algeria, Afrika Selatan, Aljazair, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Chad, Cote d'Ivoire, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Khatulistiwa, Kamerun, Kenya, Komoro, Kongo (Kinshasa), Lesotho, Liberia, Libia, Madagaskar, Malawi, Mali, Maroko, Mauritania, Mauritius, Mesir, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Pantai Gading, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Rwanda, Sao Tome and Principe, Sierra Leone, Seychelles, Senegal, Somalia, Sudan, Sudan Selatan, Tanjung Verde, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe dan The Commision of the African Union (FOCAC, 2019).

Forum Tiongkok-Afrika pula memfasilitasi kepentingan ekonomi Tiongkok dan negara-negara di kawasan Afrika seperti adanya mekanisme pembebasan tarif, kemudahan investasi, dan keikutsertaan hampir seluruh negara-negara di Kawasan Afrika di dalam FOCAC. FOCAC sendiri, tanpa memandang wilayah sub-regional dan besarnya volume perdagangan dan investasi Tiongkok dengan negara tersebut. Dalam memudahkan kepentingan ekonomi Tiongkok dengan negara-negara di kawasan Afrika, Tiongkok harus mampu bersaing sebagai kekuatan baru dalam interaksi ekonomi antara negara-negara Afrika dengan kekuatan-kekuatan ekonomi dunia (Gazibo & Mbabia', 2012).

Persaingan tersebut kemudian ditangani dan dijawab langsung dengan strategi-strategi yang ada dalam FOCAC, seperti pemberian bantuan luar negeri, penguatan sentimen

anti-Barat dan anti-hegemoni, serta penggunaan sifat FOCAC yang fleksibel dan lunak. Masing-masing strategi ini digunakan untuk menghadapi jenis persaingan yang berbeda. Selain itu adanya kemiripan diantara organisasi-organisasi kemitraan di kawasan Afrika yang dibentuk oleh Uni Eropa, China, Amerika, Rusia, Jepang, Iran, India, dan Korea Selatan. Organisasi-organisasi kemitraan itu juga menjadi salah satu indikator yang memperlihatkan kuatnya persaingan di antara negara-negara tersebut dalam diplomasi dengan negara-negara di kawasan Afrika (Gazibo & Mbabia', 2012).

*Forum On China-Africa Cooperation* (FOCAC) menjadi bagian dari sejumlah komitmen yang dibuat dan dimasukkan ke dalam *Beijing Action Plan* antara Tiongkok dengan negara-negara di kawasan Afrika. Komitmen ini mencakup kerja sama di berbagai sektor, termasuk bidang ekonomi, politik dan hubungan internasional. Rencana kerjasama Tiongkok-Afrika juga menguraikan komitmen konkrit dalam berbagai bidang, termasuk pembangunan, menyejahterakan manusia, bantuan teknis, dan infrastruktur. Namun demikian, FOCAC bertujuan untuk lebih mengunggulkan dalam hubungan antara Tiongkok.

Sejak terbentuknya *Forum On China-Africa Cooperation* (FOCAC), perdagangan dan kerjasama ekonomi antara Tiongkok dan negara-negara di kawasan Afrika mengalami peningkatan ekspansi ekonomi secara keseluruhan. Negara-negara di kawasan Afrika pun menjadi tujuan bagi investasi Tiongkok. Langkah-langkah kerjasama Tiongkok-Afrika sudah diatur dan direncanakan setiap diselenggarakannya forum tersebut, seperti pembentukan dana pembangunan China dengan negara-negara di kawasan Afrika, pembentukan zona perdagangan, kerjasama ekonomi dan mendorong investasi perusahaan Tiongkok di kawasan Afrika.

## Kesimpulan

Perkembangan Republik Rakyat Tiongkok menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar didunia mendorong negara tersebut memiliki ambisi kuat dalam menyebarkan pengaruh politiknya untuk menancapkan hegemoni sebagai kekuatan *super power* di dunia. Dalam studi perpolitikan global, Afrika merupakan kawasan yang sangat jarang dilirik oleh negara *super power* karena dinilai rentan terjadi konflik dan tingkat kemiskinan endemik yang menjadi penyebab sulitnya terintegrasi dengan perkonomian global. Tiongkok berupaya untuk mencampakan pengaruh mereka terhadap negara-negara Afrika. Hadirnya dukungan dari negara-negara Afrika akan membuat posisi Tiongkok semakin kokoh untuk memegang kendali suatu hegemoni global dibawah kekuasaan Tiongkok di masa yang akan datang.

*Five Nos* dapat dipahami sebagai pendekatan yang bersifat *soft hegemony* karena meskipun dikemas sebagai pendekatan non-intervensi dan saling menghormati. Pendekatan ini justru menciptakan bentuk dominasi terselubung Tiongkok di kawasan Afrika. Dalam kerangka *Method of Historical Structure* dari Robert Cox, hegemoni tidak hanya dibangun melalui kekuatan militer atau paksaan, tetapi melalui kombinasi tiga elemen lain seperti ide, kapasitas material, dan institusi. Pertama, secara ideologis, *Five Nos* membentuk narasi bahwa Tiongkok adalah mitra sejajar dan bukan kekuatan imperialis seperti negara-negara barat. Ide ini tumbuh dalam konteks sejarah Afrika yang mengalami trauma akan kolonialisme, sehingga diterima secara luas dan tanpa

resistensi. Kedua, dari segi kapasitas material, Tiongkok memiliki kekuatan ekonomi yang besar, yang digunakan untuk membiayai infrastruktur dan kerja sama ekonomi di Afrika melalui proyek-proyek seperti *Belt and Road Initiatives*. Hal ini menciptakan ketergantungan ekonomi negara-negara Afrika terhadap Tiongkok. Ketiga, institusi-institusi kerja sama, baik bilateral maupun multilateral seperti FOCAC. Hal ini memperkuat posisi Tiongkok sebagai aktor dominan yang mengatur arah kerja sama. Sehingga *five nos* dapat dikatakan sebagai pendekatan bersifat *soft hegemony* oleh Tiongkok kepada negara-negara di kawasan Afrika.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan diatas, terdapat beberapa saran atau rekomendasi yang ingin diberikan yaitu: Pertama adalah untuk pembaca maupun peneliti selanjutnya, dapat meneliti dengan menggunakan pendekatan yang berbeda ataupun metode maupun variable yang berbeda. Sehingga nantinya mendapatkan penemuan baru ataupun kebaruan dalam hasil penelitian selanjutnya yang berguna untuk kalangan akademisi HI yang lainnya. Saran kedua adalah dalam penelitian ini diharapkan pendekatan Tiongkok melalui *Five Nos* dalam menaruh pengaruhnya berupa *soft hegemony* dapat digunakan secara bijak dalam membantu pengembangan negara-negara berkembang di Afrika.

### **Daftar Pustaka**

- ADB. (2013). *Asian Development Bank*. Retrieved January 9, 2015, from [www.adb.org](http://www.adb.org)
- AEC Key Message Booklet. (2014). *ASEAN.org*. Retrieved from [www.asean.org](http://www.asean.org)
- Agbebi, M., & Virtanen, P. (2017). Dependency Theory – A Conceptual Lens to Understand China's Presence in Africa? *Forum for Development Studies*, 429-451.
- Amawi, A. &. (2013). *The Theoretical Evolution of International Political Economy* (Thrid Edition ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Anver, V. (2007). China is Good for Africa. *African Business*.
- APEC.org. (2014). *Asia Pacific Economic Cooperation*. Retrieved December 20, 2014, from [www.apec.org](http://www.apec.org)
- ASEAN.org. (2014). *ASEAN*. Retrieved December 30, 2014, from [www.asean.org](http://www.asean.org)
- Batty, F. (2019). No Questions Asked? Developmet and the Paradox oc China's Africa Policy. *Insight Turkey*, 151 - 166.
- BBC News. (2014). *Apec summit: Chinese trade pact plan backed by leaders*. Retrieved December 20, 2014, from <http://www.bbc.com/news/world-asia-29999782?print=true>
- Beeson, M. (2009). *Institutions of the Asia Pacific : ASEAN, APEC and beyond*. New York: Routledge.
- Boc, A. (2015). The Power of Language: Globalizing “The Chinese Dream”. *Fudan J. Hum. Soc. Sci*, 533-551.
- Bower, E. Z. (2012). The U.S.-ASEAN Relationship in 2030. *CSIS Publication*(May 11).
- Brem, S., & Stiles, K. (2008). *Cooperating Without America: Theories and Case Studies of Non-Hegemonic Regimes*. London: Routledge.
- Breslin, S. e. (2002). *New Regionalism in Global Political Economy*. London: Routledge.
- Chai, K. G. (2010). *The Politics of Economic Regionalism: Explaining Regional Economic Integration in Asia*. London: Palgrave Macmillan.
- Global & Policy Vol.13, No.01, Januari -Juni 2025*

- Cheng-Chwee Kuik, N. A. (2012). The China Factor in the U.S. "Reengagement" With Southeast Asia: Drivers and Limits of Converged Hedging. *Asian Politics & Policy*, 315-344.
- Cox, R. W. (2004). Beyond Empire and Terror: Critical Reflections on the Political Economy of World Order. *New Political Economy*, 311.
- Das, S. B. (2013). RCEP and TPP: Comparison and Concern. *ISEAS Perspective*.
- Farrell, M. B. (2005). *Global politics of regionalism : an introduction*. London: Pluto Press.
- FOCAC. (2013). *Xi's Visit Stars New Era of China-Africa Ties*. Retrieved October 18, 2023, from <http://ww.focac.org/eng/zt/1/t1027918.htm>
- Graham, E. (2014). Southeast Asia in the US Rebalance: Perceptions from a Devided Region. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 35(3 (December 2013)), 305-332.
- Harahap, F. N. (2020). Analisis Potensial Tiongkok Untuk Menjadi Negara Hegemon di Kawasan Asia Timur Melalui Strategi One Belt One Road. *Journal of International Relations*, 6(2), 164-172.
- Ikenberry, G. J., & Nexon, D. H. (2019). Hegemony Studies 3.0: The Dynamics of Hegemonic Orders. *Security Studies*, 398-400.
- Jones, A. (2010). *Globalization: Key Thinkers*. Cambridge: Polity Press.
- Junio, D. R. (2014). *Asian Infrastructure Investment Bank: An Idea Whose Time Has Come? (The Diplomat)*. Retrieved January 10, 2015, from <http://thediplomat.com/2014/12/asian-infrastructure-investment-bank-an-idea-whose-time-has-come/>
- Kelly, R. E. (2007). Security Theory in the "New Regionalism". *International Studies Review*, 9, 197-229.
- Kumar, N. (2011). *Financial Crisis and Regional Economic Cooperation in Asia-Pacific: Towards an Asian Economic Community?* UNESCAP.
- Leysens, A. (2008). *The Critical Theory of Robert W. Cox*. New York: Palgrave Macmillan.
- Oba, M. (2014). ASEAN and the Creation of a Regional Community. *Asia Pacific Review*, 21, 63-78.
- Overholt, H. W. (1994). *The Rise of China: How Economic Reform is Creating a New Superpower*. New York: W.W Norton & Norton.
- Paszak, P. (2020, October 14). *China's Growing Influence in International Organizations*. Retrieved 10 22, 2024, from Warsaw Institute: <https://warsawinstitute.org/chinas-growing-influence-international-organizations/>
- Patria, N., & Arief, A. (2015). *Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Rathus, J. (2011). *Japan, China and Networked Regionalism in East Asia*. London: Palgrave Macmillan.
- Rukin. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

- Sinclair, T. J. (2016). Robert W. Cox's Method of Historical Structures. *Globalizations*, 1 - 11.
- Söderbaum, B. H. (2002). Theorising the rise of Regioness. In S. Breslin (Ed.), *New Regionalisms in the Global Political Economy*.
- Solis, M. (Cross Regional Trade: Understanding Permeated Regionalism in East Asia). 2008. *Springer*.
- Thayer, C. (2013). *China's New Regional Security Treaty (The Diplomat)*. Retrieved December 20, 2014, from <http://www.thediplomat.com/2013/10/chinas-new-regional-security-treaty-with>
- Toruan, G. T. (2021). Kebijakan Belt and Road Initiative sebagai Alat Soft Power Cina Dalam Membangun Hegemoni Di Kawasan Asia Tenggara (Studi Kasus : Investasi Cina di Indonesia). *Jurnal Soshum Insentif*, 4(1).
- Traoré, S. E. (2021). The Strategy of China in Sino-African Relation. *Open Journal of Political Science*, 12.
- UNESCAP. (2014). *UNESCAP*. Retrieved December 30, 2014, from [www.unescap.org](http://www.unescap.org)
- VOA Indonesia. (2022, January 06). *Beragam Reaksi Warga Afrika Tanggapi Kehadiran China*. Retrieved from VOA Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/beragam-reaksi-warga-afrika-tanggapi-kehadiran-china-/6384261.html>
- Yuan, L. T. (1994). The ASEAN Free Trade Area. *Asia-Pacific Economic Literature*, 8, 1-7.
- Yuzawa, T. (2010). The United States and the ASEAN Community: Factors for Active US Engagement in ASEAN Community Buliding. In *ASEAN Study Group Report* (pp. 126-137). The Japan Institute of International Affairs.
- Zheng, X. W. (2012). China-ASEAN Security Cooperation in Perspective. *China Institute of Contemporary International Relations (CCIR)*.